

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2017. *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bismar Siregar, dkk. 1998. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Daud A. Busroh & Abubakar Busroh. 1938. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek permasalahannya*. Bandung: Bandar Maju.
- Nasrihana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rivai, Andi Wijaya. 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sambas, Leonarda. 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Situmorang, Victor. 1988. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta: Melton Putra.
- Suratman & H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

- Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Metro Jateng. Rabu 27 Juli 2016. *Bayi 25 Hari jadi Penghuni Termuda Rutan Boyolali*. [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://metrojateng/2016/07/27/bayi-25-hari-jadi-penghunitermudarutanboyolali/&ei=k5mxZlQ&Ic=idID&s=1&m+485&host=www.google.co.id&ts+1499397291&sig=ALNZjWnLnzKPkVtb\\_BwqeVqX3ys-XC9Ctg](http://googleweblight.com/?lite_url=http://metrojateng/2016/07/27/bayi-25-hari-jadi-penghunitermudarutanboyolali/&ei=k5mxZlQ&Ic=idID&s=1&m+485&host=www.google.co.id&ts+1499397291&sig=ALNZjWnLnzKPkVtb_BwqeVqX3ys-XC9Ctg). diunduh pada 7 Juli 2017. pukul 10.30 WIB.
- Tribun. Jumat 2 April 2010. *Bayi Tujuh Bulan Turut Ditahan Bersama Ibunya*. [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://m.tribunnews.com/regional/2010/04/02/bayi-tujuh-bulan-turut-ditahan-bersamaibunya&ei=ZatcdnT&IC=idID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511431912&sig=ANTYL2\\_dPMDWz1qGtsBAIb1p4bDOuqobsA](http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.tribunnews.com/regional/2010/04/02/bayi-tujuh-bulan-turut-ditahan-bersamaibunya&ei=ZatcdnT&IC=idID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511431912&sig=ANTYL2_dPMDWz1qGtsBAIb1p4bDOuqobsA). diunduh pada 23 November 2017 pukul 17.47 WIB.
- Wikipedia. 24 November 2017. *Lembaga Pemasyarakatan*. [http://googleweblight.com/?lite\\_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan&ei=IJtJwOj4&Ic=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511690340&sig=ANTY\\_L3ubD5TQq7cxQNw\\_zgxxDokmXMFkw](http://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan&ei=IJtJwOj4&Ic=id-ID&geid=33&s=1&m=443&host=www.google.co.id&ts=1511690340&sig=ANTY_L3ubD5TQq7cxQNw_zgxxDokmXMFkw). diunduh pada tanggal 26 November 2017. pukul 17.28 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-170.PK.01.01.02. Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-11.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Kemandirian Klien Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-489.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Keperawatan Kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-423.PK.01.04.06 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengaduan

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Perawatan Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di LAPAS, RUTAN, LKPA dan RS PENGAYOMAN